

**FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT  
SECARA BERKELANJUTAN**

Hafiz Elfiansya Parawu

**Abstrak**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pihak swasta yang diyakini dapat menjadi pendekatan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Implementasi kebijakan CSR berbasis pemberdayaan masyarakat sudah pula dilaksanakan oleh PT. Semen Bosowa Maros (SBM). Daerah utama yang dijadikan sasaran CSR berbasis pemberdayaan masyarakat adalah daerah operasi PT. SBM di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga secara berkelanjutan. Lokasi penelitian pada area operasi PT. SBM di Desa Baruga melalui jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor determinan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga adalah faktor dukungan penentu kebijakan, ketersediaan sumber daya, dukungan implementor kebijakan, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan publik, corporate social responsibility, pemberdayaan masyarakat masyarakat*

**PENDAHULUAN**

Perusahaan pada hakikatnya merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan yang keberadaannya tidak akan terlepas dari masyarakat dan lingkungan, sehingga sudah seharusnya, jika perkembangan suatu perusahaan memerhatikan perkembangan masyarakat dan lingkungan di sekitar area operasi perusahaan, bukan hanya mengejar *profit* (keuntungan) semata. Konsep *Triple Bottom Lines* atau 3P (*Profit, Planet, People*) yang digagas Elkington pada tahun 1998 dalam bukunya *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21<sup>st</sup> Century Business*, menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi (*profit*) belaka, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) secara berkelanjutan (*sustainability*) (Suharto, 2010: 5).

Keterkaitan erat antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan inilah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas inilah yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Harapan dari ditetapkannya kebijakan ini tentunya agar perusahaan dalam menjalankan aktifitas usahanya tidak mengejar *profit* semata, namun juga berkewajiban melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkesinambungan, khususnya pada area operasi perusahaan.

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pihak swasta (Dobers dan Halme, 2009: 238; Wahyuningrum, dkk, 2013: 110;), yang diyakini dapat menjadi pendekatan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia (Suharto, 2010: 65), namun, hasil implementasi kebijakan CSR di Indonesia pada kenyataannya belumlah begitu menggembirakan bila dikaitkan dengan aspek keberdayaan masyarakat di sekitar area operasi perusahaan. Masih banyak perusahaan besar mengeluarkan dana untuk berbagai kegiatan sosial yang tanpa fokus, arah, dan keberlanjutan program yang jelas (Suharto, 2010: 56). Program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, lebih ironisnya lagi, tidak sedikit yang dijadikan ladang manipulasi dan korupsi (Mardikanto dan Soebiato, 2013: iv). Banyak perusahaan yang mengklaim telah mempraktekkan pemberdayaan masyarakat, padahal yang mereka lakukan hanyalah program-program yang seadanya, karitatif, tidak memberdayakan, dan tak lebih dari menggugurkan kewajiban saja (Suharto, 2010: xxii-xxiii).

Implementasi kebijakan CSR berbasis pemberdayaan masyarakat sudah pula dilaksanakan oleh PT. Semen Bosowa Maros (SBM) sebagai salah satu *private sector* di Indonesia Timur sejak tahun 1990 dalam bentuk *community development* (pemberdayaan masyarakat) melalui Divisi Comdev yang sejak tahun 2015 berubah menjadi *Environment and Community Development Department*. Daerah utama yang dijadikan sasaran CSR berbasis pemberdayaan masyarakat adalah daerah operasi PT. SBM di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. PT. SBM sebagai industri semen dengan kapasitas 1,8 juta ton per tahun sudah memberi perhatian terhadap masyarakat sekitar pabrik melalui berbagai upaya pendekatan yang proaktif dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat aktifitas perusahaan. Keberadaan Divisi *Environment and Community Development Department* dalam menjalankan CSR PT. SBM merupakan terobosan yang sangat efektif dalam meminimalisir benturan dengan budaya lokal dan kesenjangan sosial ekonomi agar senantiasa terpelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar serta guna meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, terlihat bahwa peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui implementasi kebijakan CSR. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: “Apakah faktor-faktor determinan implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga secara berkelanjutan?”.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Dunn (2003: 56), memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai *policy implemetation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentilly theoretical*. Konteks implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Meter dan Horn (1975), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Implementasi kebijakan (Edwards III, 1980: 9-11), dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur birokrasi. Sedangkan menurut Meter dan Horn (1975), terdapat 5 (lima) variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: (1) Standar dan sasaran kebijakan; (2) Sumberdaya; (3) Komunikasi

antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) Karakteristik agen pelaksana; dan (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Terdapat 2 (dua) variabel besar yang memengaruhi implementasi kebijakan menurut Grindle (1980), yaitu konten kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Variabel konten kebijakan, meliputi: (1) *Interest affected* (pengaruh berbagai kepentingan); (2) *Type of benefits* (jenis manfaat); (3) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai); (4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan); (5) *Program implementor* (pelaksana program); dan (6) *Resources committed* (berbagai sumber daya yang dikerahkan). Variabel konteks implementasi, meliputi: (1) *Power, interest and strategi of actor involed* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat); (2) *Intitution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan penguasa); dan (3) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana).

Terdapat 3 (tiga) kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), yaitu: (1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problem*); (2) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (*ability of statute to structure implementation*); dan (3) Variabel di luar kebijakan/ variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Berdasarkan uraian berbagai model implementasi kebijakan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini akan menggunakan model Grindle (1980) untuk menganalisis implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Pemilihan model Grindle (1980) didasarkan oleh adanya variabel konten kebijakan dan konteks implementasi yang dapat mencakup semua variabel yang dikemukakan oleh model implementasi kebijakan yang lain.

### ***Corporate Social Responsibility (CSR)***

CSR merupakan konsep yang masih terus berkembang, sehingga CSR memiliki beraneka ragam definisi. Definisi tunggal serta kriteria spesifik mengenai konsep CSR belum ada dikarenakan implementasi dan penjabaran CSR yang dilakukan perusahaan juga berbeda-beda. Anatan (2009: 2), mendefinisikan CSR sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. *The European Commission* (Wiwoho, 2008: 110), mendefinisikan CSR bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi dilaksanakan secara sukarela dan ada dorongan yang tulus dari dalam, serta merupakan investasi untuk lingkungan dan *stakeholders*.

*World Business Council for Sustainable Development* (Rahadhini, 2010: 14), mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini menyiratkan makna bahwa CSR harus dilaksanakan secara terus menerus agar tercipta pembangunan berkelanjutan yang merupakan inti dari CSR, sehingga elemen *profit*, *people*, dan *planet* menjadi satu kesatuan utuh yang dapat memberikan manfaat yang besar dan menyentuh semua aspek kehidupan.

### **Pemberdayaan Masyarakat secara Berkelanjutan**

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 40). Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995).

CSR dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari kebijakan perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. Implementasi kebijakan CSR dalam bentuk pembangunan masyarakat (*community development*) atau pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan bentuk implementasi kebijakan CSR utama yang harus dilakukan oleh perseroan atau perusahaan, tak terkecuali yang bergerak dalam bidang eksplorasi sumber daya alam (Suharto, 2010: 37).

## **METODOLOGI**

Lokasi penelitian pada area operasi PT. Semen Bosowa Maros (SBM) di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu: data primer dan sekunder. Fokus penelitian dalam penelitian ini, adalah faktor-faktor determinan implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti, dan *triangulasi* sumber. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang merupakan instrumen kunci (*key instrument*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif dari Miles and Huberman (1992: 20), yaitu: (1) Reduksi data (*data reduction*); (2) Penyajian data (*data display*); dan (3) Penarikan kesimpulan (*verification*).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor determinan implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros**

Berdasarkan uraian berbagai faktor determinan implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli dan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, maka peneliti menemukan bahwa ada 4 (empat) faktor determinan dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga, yaitu:

#### **1. Dukungan penentu kebijakan**

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan CSR PT. SBM sudah cukup mendapat dukungan keberpihakan dan komitmen dari pihak PT. SBM, hanya saja dukungan keberpihakan dan komitmen dari pihak PT. SBM belum begitu terfokus pada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga secara berkelanjutan. Bentuk bantuan dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM selama ini dominan masih terealisasi dalam bentuk *charity* dan *philanthropy*.

Kegiatan CSR yang dilakukan pihak PT. SBM dalam wujud pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta infrastruktur desa tentunya dapat dikatakan sebagai wujud perhatian PT. SBM pada masyarakat dan lingkungan di Desa Baruga. Namun, di samping itu

masyarakat Desa Baruga sangat berharap pihak PT. SBM dapat menunjukkan perhatian dan keberpihakannya melalui kegiatan CSR yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat serta dapat menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Komitmen awal pembangunan PT. SBM di Desa Baruga adalah untuk dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar pabrik dan juga untuk menjaga kelestarian lingkungannya melalui kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan. Untuk itu, komitmen awal dari pihak PT. SBM tersebut haruslah dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan, khususnya berbagai program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan di Desa Baruga.

Semakin kuat keberpihakan dan komitmen PT. SBM untuk berfokus dalam mengimplementasikan CSRnya dalam bentuk program berbasis pemberdayaan masyarakat maka akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar pabrik dan dapat menjaga kelestarian lingkungan dari dampak operasi pabrik secara berkelanjutan. Perwujudan dari keberpihakan dan komitmen yang kuat dari pihak PT. SBM inilah yang sangat diharapkan dan dinantikan oleh masyarakat Desa Baruga.

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga secara berkelanjutan sudah cukup mendapat perhatian dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Hanya saja dukungan perhatian dan keberpihakan yang diberikan masih harus terus ditingkatkan agar implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga secara berkelanjutan dapat segera terwujud.

Berbagai dampak yang terjadi di Desa Baruga akibat beroperasinya pabrik semen PT. SBM, seperti permasalahan polusi debu dan pencemaran air limbah pabrik, kerusakan gunung karst, dan masih cukup banyaknya masyarakat yang tergolong keluarga prasejahtera, tentunya harus menjadi perhatian utama dari pihak PT. SBM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Untuk itu, pihak PT. SBM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros harus menguatkan kembali komitmen awalnya untuk dapat membenahi segala dampak yang ditimbulkan akibat operasi pabrik semen PT. SBM di Desa Baruga, terkhusus dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga secara berkelanjutan.

Guna menunjukkan keberpihakan dan komitmennya dalam memerhatikan peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan serta pelestarian lingkungan di Desa Baruga, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros untuk dapat menetapkan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur tentang kegiatan CSR yang beroperasi di Kabupaten Maros.

Maksud dan tujuan dari kebijakan pemerintah daerah itu nantinya sebagai dasar yang jelas bagi perusahaan dalam mengimplementasikan kegiatan CSR-nya di Kabupaten Maros. Adanya kebijakan tersebut juga untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR dan sekaligus mendorong perusahaan, bersama masyarakat, dan pemerintah setempat dan terkait untuk memerhatikan persoalan sosial dan lingkungan hidup di Kabupaten Maros.

## **2. Ketersediaan sumber daya**

Hasil penelitian mengungkapkan, dukungan SDM (sumber daya manusia) yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan di Desa Baruga, adalah ketersediaan SDM yang memiliki tingkat kompetensi yang baik di bidang kerjanya masing-masing. Ketersediaan SDM yang

berkompeten dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM mutlak dimiliki, baik oleh pihak *Environment and Community Development Department* PT. SBM sendiri, mitra TPKS-BB, maupun pihak-pihak terkait yang dilibatkan. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh setiap SDM yang terlibat dalam merumuskan dan menjalankan program-program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat, maka peluang keberhasilan implementasi kebijakan CSR semakin besar dan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan pun dapat terwujud. Kompetensi SDM inilah yang harus terus ditingkatkan oleh pihak PT. SBM dalam mengimplementasikan kebijakan CSRnya.

Fasilitas kegiatan telah disediakan oleh pihak PT. SBM bagi para warga dan aparat desa, mitra TPKS-BB, serta sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan CSR adalah berupa aula pertemuan, ruang rapat di kantor *Environment and Community Development Department* PT. SBM, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Semua fasilitas kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, dan diskusi guna merumuskan sejumlah program kegiatan CSR yang akan dilakukan. Dukungan sumber daya fasilitas kegiatan yang cukup memadai ini sangat berguna dan sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. SBM di Desa Baruga.

Dukungan ketersediaan pendanaan dari pihak PT. SBM, baik berupa dana maupun dalam bentuk bantuan semen maupun dalam bentuk yang lainnya, nampaknya harus semakin ditingkatkan. Dana dan bantuan semen yang sangat dibutuhkan masyarakat Desa Baruga dalam proses pencairan dan pemberiannya masih kerap kali terjadi keterlambatan. Bahkan terkadang keterlambatan tersebut ditambah lagi dengan ketidaksesuaian dengan dana dan bantuan semen sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Baruga. Pemberian bantuan CSR PT. SBM yang sesuai dengan permintaan masyarakat, baik dari segi jumlah maupun waktu pemberiannya penting untuk diperhatikan lagi agar masyarakat tidak mengalami kekecewaan atas keterlambatan dan kekurangan bantuan CSR dari PT. SBM tersebut.

Hal penting yang juga sangat penting untuk dilakukan oleh pihak PT. SBM adalah dengan membuat dan memberi kejelasan dan laporan kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat di Desa Baruga, akan besaran dana CSR yang khusus dialokasikan oleh pihak PT. SBM. Transparansi dan akuntabilitas ini sangat penting untuk dikedepankan agar keterbukaan informasi terkait alokasi anggaran CSR PT. SBM dalam setiap tahunnya dalam bentuk laporan CSR dapat diketahui oleh masyarakat (publik).

### **3. Dukungan implementor kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan anggota personil *Environment and Community Development Department* terlihat sudah cukup baik dari segi pengetahuan dan pengalamannya dalam kegiatan CSR PT. SBM selama ini. Kemampuannya ini pun semakin meningkat melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis tentang CSR yang sering mereka hadiri. Kemampuan segenap mitra TPKS-BB juga terlihat cukup baik, khususnya terkait pengetahuan akan permasalahan yang terjadi di dusun dan desa mereka. Pihak-pihak terkait yang diajak bekerja sama juga memiliki kemampuan yang baik di bidangnya masing-masing.

Daya tanggap dalam wujud keaktifan dan sikap antusias dari para implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM akan berdampak positif kepada masyarakat, dan ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan dukungan partisipasi yang baik pula dari masyarakat Desa Baruga.

Daya tanggap para implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM yang sangat berpengaruh adalah terkait keaktifan, sikap antusias, dan kepedulian para implementor kebijakan CSR PT. SBM pada kebutuhan masyarakat di Desa Baruga. Daya tanggap ini harus semakin dikedepankan dan ditingkatkan.

Faktor strategi dari para aktor implementasi kebijakan CSR PT. SBM pun menjadi sangat penting dan sangat memengaruhi keberhasilan kegiatan CSR yang dilakukan. Nampak pada strategi pelibatan masyarakat dalam pembangunan jalan desa, jalan tani, jembatan, embung, dan bak PAMSIMAS. Strategi kolaborasi dengan pihak lain yang terkait, misalnya dalam program pembangunan jamban keluarga dengan bekerjasama dengan pihak Kapolsek, Danramil, Camat, dan tenaga Puskesmas sebagai penggerak dan pemberi motivasi bagi masyarakat. Dalam program penanaman palawija di pekarangan rumah hingga proses pembuatan pupuk organik, juga dilakukan penerapan strategi dengan memberdayakan para ibu-ibu yang dibantu oleh tenaga penyuluh pertanian.

Strategi-strategi pendekatan yang telah dilakukan segenap aktor implementasi kebijakan CSR PT. SBM, sangat berpengaruh pada keberhasilan dari setiap kegiatan CSR yang dilakukan di lapangan. Strategi implementasi dengan melibatkan peran aktif berbagai pihak, khususnya partisipasi masyarakat, akan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. SBM, utamanya pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

#### **4. Partisipasi masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan masyarakat Desa Baruga nampak dalam bentuk penggunaan bantuan semen 50 zak semen/dusun dan bantuan lainnya secara baik dan sesuai peruntukannya tentunya menjadi faktor yang memengaruhi sehingga pihak PT. SBM hingga saat ini masih menyalurkan bantuan CSR-nya. Begitupula kepatuhan para kaum ibu yang tergabung dalam KWT (kelompok wanita tani) dalam mengikuti segala kegiatan, mulai dari kegiatan sosialisasi, pelatihan, hingga praktik penanaman, pembuatan pupuk, dan pembuatan racun hama organik di halaman rumah warga.

Bentuk kepatuhan yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM adalah penggunaan bantuan CSR secara baik dan sesuai peruntukannya serta kepatuhan dalam mengikuti rangkaian kegiatan CSR yang dilaksanakan. Wujud kepatuhan dari masyarakat ini sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga.

Partisipasi aktif masyarakat tentunya menjadi faktor yang memengaruhi sehingga pihak PT. SBM masih tetap menyalurkan dana CSR-nya dan kini mulai menggiatkan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi aktif dari masyarakat telah membuat pihak PT. SBM merasa bahwa program-program CSR yang mereka lakukan selama ini, khususnya yang bersifat pemberdayaan masyarakat, dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Baruga.

Partisipasi aktif dari masyarakat dapat tumbuh jika daya tanggap dan kepatuhan dari pihak implementor kebijakan CSR PT. SBM juga baik. Masyarakat akan mudah untuk turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan CSR PT. SBM jika mereka melihat adanya daya tanggap, kepatuhan, dan partisipasi yang aktif pula dari pihak implementor kebijakan. Kondisi inilah yang harus diupayakan dan ditingkatkan agar berbagai program CSR PT. SBM, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan.

## KESIMPULAN

Faktor-faktor determinan dalam implementasi kebijakan CSR PT. Semen Bosowa Maros dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga, adalah faktor dukungan penentu kebijakan, ketersediaan sumber daya, dukungan implementor kebijakan, dan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. 2013. *Kabupaten Maros dalam Angka*
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press
- Chandler, Ralph C and Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. Singapore: John Wilwy & Sons
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. (Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa.dkk.) Yogyakarta: Gajah Mada University Pres
- Edward III, George C. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press
- Grindle, M. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mazmanian, Daniel H. and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins
- Meter, Donald Van, and Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society 6. London: Sage
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS
- \_\_\_\_\_ 2010. *CSR dan Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta

## Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas

## Hasil Penelitian, Jurnal, dan Artikel Ilmiah:

- Anatan, L. 2009. Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia, (Online), (<http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-manajemen/article/view/220>,
- Dobers, Peter and Minna Halme. 2009. Editorial Corporate Social Responsibility and Developing Countries. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt* 16 (p. 237-249)
- Rahadhini, M.D. 2010. Peran Public Relations dalam Membangun Citra Perusahaan melalui Program Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. 1: 11-21*

Wiwoho, Jamal. 2008. Corporate Social Responsibility (CSR) Ditinjau dari Aspek Sejarah, Falsafah, dan Keutungan serta Kendalanya. *Jurnal Corporate Social Responsibility (CSR) Vol. 37 No. 2*